

## ***New Media dan Demokrasi: Menimbang Peluang***

*Nunung Prajarto<sup>1</sup>*

### ***Abstract***

*New media is the future of communication. This statement underlines the potential contribution of new media, as the development of communication technology promises. Some who worry about the negative impacts of new media, lead to reactive instead of proactive and minimize the usage. Others, who are convinced by the potential power of new media in enhancing democracy keen to make the best use of it. This article highlights this controversy.*

### **Kata-kata Kunci:**

*new media, kontribusi, demokrasi*

### **Pengantar**

Perkembangan dan penerapan teknologi komunikasi banyak memberi kontribusi bagi kehidupan manusia. Sebagian dari kontribusi ini dicerminkan oleh peran dan harapan baru dalam kehidupan manusia, yang pengejawantahannya lebih dipertaruhkan pada sisi ekonomi politik gempita teknologi komunikasi (Prajarto, 2006).

---

<sup>1</sup> Y.A. Nunung Prajarto, MA. PhD adalah staf pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi, Fisipol-UGM, Yogyakarta. Penulis bisa dihubungi melalui e-mail: yanpraz@yahoo.com

Penggunaan *broadband internet*, sebagai contoh, dinyatakan sebagai sesuatu yang teramat penting untuk pertumbuhan demokrasi dan diyakini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangan Al Gore, *broadband internet* adalah versi moderen dari jaringan rel kereta api dan jalan tol penghubung sejumlah negara bagian di Amerika Serikat.<sup>2</sup> Pendapat senada tentang teknologi komunikasi di antaranya dapat dilihat dari penggunaan internet di Uganda seperti diungkapkan oleh Torach dan Bitwayiki (2006) dan di Republik Kyrgyz.<sup>3</sup> Pada tingkat praktis, manfaat teknologi komunikasi dapat dilihat dari terciptanya lapangan kerja sebagai konsekuensi munculnya industri media baru, termasuk pengelolaan *web* dan jejaring industri selular.

Di sisi lain, sebagian orang memandang bahwa kontribusi yang dirasakan dari hadirnya teknologi komunikasi tidak sepadan dengan *social and cultural cost* yang dibelanjakan masyarakat. Batas ruang privat dan ruang publik, sebagai contoh, dikacaukan dan semakin teraduk-aduk (Sassi, 2001: 89-108). Selain itu, wajah-wajah kejahatan baru seperti memperoleh percepatan ketika teknologi komunikasi memudahkan terjadinya malpraktek dan malfungsi industri komunikasi berteknologi maju (Prajiarto, 2006). Dalam kasus di Indonesia, persoalan ini menjadi kian terasa karena perangkat undang-undang dan kebijakan negara terpaksa berlari di belakang kemajuan teknologi komunikasi dan pemecahan persoalan "kejahatan teknologi komunikasi", sayangnya, hanya disandarkan pada orang tertentu yang "dipandang" mumpuni.

Tulisan di bawah ini memotret posisi dan konsekuensi kehadiran *new media*. Kasus di Indonesia akan digunakan untuk memudahkan "cara aja" dan "cara baca" persoalan ini. Cermatan terhadap hal ini akan mengantar pada penyikapan yang wajar terhadap prospek ekonomi, sosial, politik dan budaya, tanpa harus terbebani ketakutan berlebihan atas perkembangan pesat *new media*.

<sup>2</sup> Lebih jauh tentang manfaat *new media*, lihat [www.scils.rutgers.edu/~lesk/fall06/lis582/universal.pdf](http://www.scils.rutgers.edu/~lesk/fall06/lis582/universal.pdf).

<sup>3</sup> Tentang peran penggunaan internet di Kyrgyz dapat dilihat di <http://www.internetpolicy.kg>

## Bukan Raksasa Hitam Buruk Rupa

Salah satu persoalan besar dalam memberi penilaian terhadap keberadaan media massa tidaklah terletak pada baik atau buruknya media massa itu sendiri, tetapi lebih pada cara pemosisian baik dan buruk yang diberikan oleh penilai. Hal ini pada umumnya mengantar pada tiga persoalan mendasar ketika masyarakat "menghakimi" media massa, yang mencakup netralitas, kepentingan serta simplifikasi. Pemosisian untuk menilai media massa seperti ini akan melahirkan masalah lanjutan saat penilai juga menguasai media atau mampu memengaruhi media. Lebih parah lagi hasilnya, saat media massa yang lain "mengamini" penilaian itu tanpa melakukan *cross-check*, atau setidaknya, mengusahakan keberimbangan. Hal semacam ini bakal kian kentara ketika *open-platform public media* harus dihadapkan pada ketiga masalah itu. *Public broadcasting* dan *internet-based media*, contohnya, tak jarang menjadi obyek cacian dan kumpulan kesalahan waktu terjadi kasus yang mengganggu "kenyamanan" masyarakat.

Namun, persoalan netralitas, umpamanya, menjadi layak untuk digugat saat suatu acara stasiun televisi swasta diminta dihentikan penayangannya. Beberapa kasus yang terjadi di dunia Barat memang mengantar dan menggiring orang untuk berpendapat bahwa media massa terlalu *trivialized*, *commercialized*, *fragmented* dan menyebabkan orang bersikap *apathetic* serta kurang mendasarkan diri pada argumen rasional (McKee, 2005: 1-6). Namun demikian, apa salahnya bila orang lebih tertarik pada berita selebritis (*infotainment*) daripada berita tentang dinamika politik? Tidak ada yang salah. Apa salahnya bila orang kurang begitu tertarik pada persoalan politik yang serius? Tidak ada. Artinya, alasan yang bernada menyalahkan ketika orang tidak memerhatikan masalah politik dengan sendirinya harus digugurkan. Arti lebih jauhnya, orang pada dasarnya tidak bisa memaksakan kehendak pada suatu stasiun televisi untuk menghentikan penayangan acara hanya karena mereka tidak suka.

Landasan lain barangkali dibangun dari tuduhan mereka bahwa media massa tidak begitu peduli dengan kualitas isi yang mereka sampaikan pada khalayak. Alasan semacam ini seperti mengingkari bahwa masing-masing institusi media memiliki ukuran, standar atau prosedur tersendiri untuk materi komunikasi yang mereka hadirkan. Baik buruk kualitas suatu program tentu tak sekadar bisa didasarkan

pada penilaian suatu kelompok, namun justru harus dikaitkan dengan tujuan. Acara hiburan dikatakan baik bila tujuan itu tercapai. Acara yang bersifat pemberian informasi dikatakan baik bila mampu menghadirkan informasi dan membuat masyarakat *well-informed*. Menjadi sesuatu yang tidak pada tempatnya saat acara hiburan dibaca dan disikapi secara serius seperti halnya terhadap acara berita.

Menjadi semakin tidak jelas dasarnya saat efek negatif suatu acara kemudian hanya diberikan pada institusi media massa sebagai pendosa tunggal. Tanpa menutupi kebenaran bahwa perilaku meniru dilakukan sekelompok orang atau sekelompok anak terhadap isi acara itu, pemosisian dosa media perlu pula dilakukan secara *fair*. Setidaknya jangan hanya melihat dari gebyar acara yang kemudian ditelan mentah oleh penonton, tetapi perlu pula dilihat dari pola menonton atau budaya bermedia. Dari sisi ini kemudian bisa dipertanyakan secara lebih lengkap tentang kualitas isi sajian media, informasi yang disertakan media tentang isi acara, peran *state apparatus* dan masyarakat pemerhati serta yang terpenting pemaksimalan fungsi keluarga sebagai sebuah institusi. Butir penting tentang hal ini adalah netralitas penghakiman terhadap media perlu disertakan agar tidak semua ketidakberesan di dalam masyarakat dibebankan pada media.

Bahwa kesalahan media suatu ketika perlu dikesampingkan atau tidak dihiraukan secara tegas ditunjukkan oleh pelatih kesebelasan Chelsea di tahun 2006. Kecaman media terhadap *striker* Chelsea asal Ukraina Andriy Shevchenko karena minimnya kontribusi dalam mencetak gol ditanggapi dingin oleh Jose Mourinho. Dengan kepentingan tertentu yang dimiliki Jose dan Chelsea, Andriy tetap diperlihatkan hingga suatu ketika ia menunjukkan perannya dalam kemenangan Chelsea. Dalam kalimat Jose kemudian, kalau dia terlalu memerhatikan hal yang dikatakan media, dia sudah memecat Andriy pada minggu kedua di awal kompetisi.

Dua hal bisa dipetik dari hal di atas. Pertama, cara pandang seseorang terhadap media lebih ditentukan oleh kepentingan masing-masing. Kecuali untuk pelaku fanatik, media massa sebenarnya hanya salah satu faktor yang memengaruhi namun tidak teramat menentukan. Untuk kalangan anak-anak, perilaku bermedia idealnya harus tetap berada di dalam kontrol dan bimbingan keluarga dan orang tua. Kedua, kedewasaan untuk menempatkan media, hanya sebagai bahan

pertimbangan tetapi bukan sebagai *drive* mutlak, merupakan langkah yang paling tepat agar penyikapan dan penghakiman terhadap kehadiran media massa tetap berada pada koridor netral. Dengan dasar ini, fungsi dan eksistensi institusi pengontrol media hanya diperlukan manakala media massa berperilaku sewenang-wenang.

Perhatian terhadap netralitas dan kepentingan ini semakin diperlukan agar penyalahgunaan alasan "media bersalah" tidak semakin terjadi dan menjadi simplifikasi persoalan. Mayoritas kasus pemerkosaan terhadap anak-anak dengan pelaku remaja biasa dikaitkan dengan "akibat vcd porno". Bisa jadi hal itu benar: isi *vcd* secara total membuat pelaku lupa diri. Bisa jadi tidak sepenuhnya benar: isi *vcd* memengaruhi dan situasi memungkinkan terjadinya peristiwa itu dengan persentase yang bervariasi di antara keduanya. Bisa jadi juga, tidak benar sama sekali: penyidik melontarkan masalah ini dan tersangka mengiyakan atau terpaksa mengiyakan.

Uraian di atas tentunya layak dipakai untuk memotret posisi dan konsekuensi kehadiran *new media*. Pengadopsian masalah netralitas dan kepentingan tetap diperlukan agar penilaian tidak serta merta menghadirkan wajah hitam buruk rupa *new media*. Dari kaca mata perkembangan teknologi, *new media* bersifat memudahkan kehidupan manusia dan dilakukan untuk membantu manusia. Teknologi tidak salah dan *new media* pun tidak salah. Hal ini baru akan menjadi suatu hal yang salah bila dan hanya bila cara berteknologi dan cara ber-*new media*-nyalah yang salah. Arti lainnya, kesalahan bisa juga terjadi pada mereka yang justru menyalahkan.

Ketika upaya pengembangan teknologi komunikasi dilakukan di sekitar tahun 1946, dan hasilnya seperti yang bisa kita manfaatkan sekarang, pemaksimalan kemanfaatan pada manusialah yang melandasinya. Dinyatakan, konsep dasar pada waktu itu adalah pemanfaatan ulang *spectrum* untuk memberi lebih banyak kegunaan bagi lebih banyak orang. Konsep inilah yang kemudian memacu perkembangan teknologi komunikasi seperti misalnya dalam industri selular hingga ke tahap EVDO, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA dan WCDMA, perkembangan internet dan perkembangan *web-design* serta *web-management* hingga ke tahap industrialisasi *new media* (Roche, 2005; Gallagher, 2005; Davcy 2005; serta Owens dan Hamilton, 2002).

Tentu harus dicatat bahwa segala upaya pengembangan teknologi komunikasi *new media* ini dilakukan dengan tidak bebas dari kepentingan dan tujuan tertentu. Namun demikian, sejauh ini kepentingan dan tujuan tertentu itu harus pula lebih dipahami sebagai kepentingan ekonomi dan kepentingan untuk perluasan sebaran informasi daripada kepentingan untuk merusak kehidupan manusia.<sup>4</sup> *Hotmail*, sebagai contoh, dikembangkan hanya karena alasan filosofis sederhana, bahwa pertukaran *e-mail* di antara pengirim dan penerimanya harus gratis.<sup>5</sup> *Hotmail* sama sekali tidak dikembangkan dengan alasan mempermudah pendegradasian moral masyarakat melalui kemudahan dalam persebaran pesan.

Memotret keuntungan dan kerugian dari hadir dan pesatnya perkembangan berikut pemanfaatan *new media*, persoalannya kembali pada cara manusia memandang hal itu, persis ketika manusia harus menyikapi media massa konvensional. Bisakah *new media* hadir sebagai *new media* dan bukan *new media* yang berwajah buruk? Lebih arifnya, bisakah kita tidak menghadirkan raksasa di depan mata karena pada dasarnya raksasa itu tidak ada dan tidak akan pernah ada?

Langkah-langkah antisipatif barangkali memang diperlukan. Jika penyikapan terhadap media massa konvensional oleh sejumlah negara yang kehidupan kenegaraannya sudah mapan adalah untuk kepentingan *security* dan *social order*, hal yang sama bisa pula dilakukan terhadap *new media*. Perangkat perundang-undangan beserta aturan pelaksanaannya bisa didudukkan dalam kepentingan antisipatif ini. Namun demikian, ada setidaknya dua hal yang tetap perlu diperhatikan. Pertama, pasal-pasal yang dihadirkan biasanya akan berjalan tertatih-tatih mengejar perkembangan teknologi komunikasi yang berlari pesat. Kedua, pasal-pasal ini semestinya tidak diciptakan dalam kondisi ketakutan luar biasa yang sifatnya mengada-ada. Harus diingat, keberatan apa pun yang dikemukakan suatu negara, perkembangan teknologi komunikasi akan terus berjalan.

<sup>4</sup> Kecurigaan terhadap kemungkinan adanya kerusakan tatanan budaya, politik, ekonomi dan sosial biasanya dimunculkan karena terganggunya *the existing interest*, membatasi *the potential interest* pihak lain, dan dalam kerangka pemberian *warning*.

<sup>5</sup> Biaya operasional akibat pertukaran *e-mail* yang terjadi selayaknya menjadi beban atau dibebankan pada pemasang iklan.

## Peluang, Tantangan dan Penyikapan

Secara formal, kontribusi *new media* dapat dicermati dari *supply side* dan *demand side*.<sup>6</sup> Dari sisi *supply*, kontribusi *new media* bisa teridentifikasi dari dukungannya pada peningkatan GDP, terciptanya kesempatan atau lapangan kerja dan *government revenues*. Sedangkan *demand side* bisa diidentifikasi dari peningkatan produktivitas bisnis melalui jasa layanan data nirkabel oleh *new media*. Dalam catatan Entner dan Lewin (2005), GDP, lapangan kerja dan pajak terbayar menunjukkan kecenderungan yang meningkat di Amerika Serikat dengan adanya industri jasa nirkabel. Selain itu, kontribusi bisa pula dirasakan di luar masalah *supply side* dan *demand side*, yakni melalui kontribusinya dalam penciptaan ruang sosial baru dan ruang budaya baru yang difasilitasi oleh *new media*. Dari keberlangsungan suatu proses komunikasi, hadirnya *new media* mau tidak mau harus diberi apresiasi khusus karena telah berjasa besar dalam pengefektifan dan pengefisienan proses komunikasi.

Dengan mempertimbangkan bahwa tidak ada satu pun negara yang bebas dari perkembangan teknologi komunikasi dan *new media*, keuntungan kompetitif di masa depan dari *new media* tidak lagi berada pada mereka yang memiliki teknologi tetapi pada mereka yang mampu secara terbaik memanfaatkan teknologi. Kesadaran terhadap hal ini telah dipunyai oleh Amerika Serikat, yang sudah begitu memuja teknologi sejak tahun 1960-an, untuk masalah *security* dan *social order*-nya (Myers, 2000: 5-9). Kemungkinan lebih jauh, semua negara pun kini sudah menyadari persoalan ini, walaupun untuk menjadi yang terbaik dalam pemanfaatan teknologi merupakan problem tersendiri. Setidaknya, persoalan itu akan terbaring pada pertemuan antara teknologi dan kebijakan.<sup>7</sup> Perkembangan teknologi informasi di India, sebagai contoh, menunjukkan peningkatan sebesar 24% pada kurun waktu 2003-2004 (Dastidar, 2006: 68-84). Perkembangan besar

<sup>6</sup> Masalah *supply side* dan *demand side* secara khusus untuk industri selular dapat dilihat di "Aras dan Arus Kontribusi: Ekonomi Politik Industri Selular" (terarsip di <http://yanpraz.multiply.com>).

<sup>7</sup> Diskusi tentang interseksi dari teknologi dan kebijakan ini pernah dilakukan di Arlington, Virginia dalam konferensi *internet society* tanggal 18-21 Juni 2002. Lihat [www.inet2002.org/CD-ROM/lu65rw2n/printedprogram.pdf](http://www.inet2002.org/CD-ROM/lu65rw2n/printedprogram.pdf).

juga terjadi di Vietnam dan China, walaupun untuk negara terakhir ini terlihat adanya kecenderungan untuk membatasi pengguna dalam penggunaan teknologi informasi.

Tantangan dalam penggunaan *new media*, selain pada interseksi antara teknologi dan kebijakan, biasanya beroperasi pada *media environment* yang terus bergerak dan berkembang. Hal ini mencakup pada pilihan antara partisipasi terbuka dan aturan-aturan terstruktur, perbedaan partisipasi dalam pemahaman dan akses terhadap *new media*, keberlanjutan yang tergantung pada dukungan dan keterikatannya dengan kebutuhan ekonomi dan isu-isu kebijakan yang harus melindungi dan mendahulukan kepentingan publik (Abrash, 2006: 7-8). Untuk mengatasi beberapa tantangan itu, Abrash selanjutnya menyodorkan alternatif berupa suatu komitmen aktif dalam mengembangkan kehidupan yang mencakup keterlibatan dalam teknologi digital, peningkatan interaksi antarpersonal dengan menggunakan media elektronik dan digital, penyesuaian-penyesuaian kebutuhan publik terhadap *media environment* baru, kebijakan dan pelaksanaan aturan yang "ramah" terhadap masyarakat demokratis serta memasukkan pertimbangan tentang perbedaan ras, struktur dan pendapat.

Esensi dari hal di atas adalah adanya ruang demokrasi baru dari pemanfaatan *new media* di masyarakat. Dalam hal ini Clift menyatakan bahwa internet, perangkat komunikasi bergerak dan bentuk-bentuk kemajuan teknologi yang lain membuka kemungkinan terjadinya partisipasi aktif yang lebih besar dari masyarakat, sama seperti halnya tingkat partisipasi dan keterlibatan lain yang lebih besar dari masyarakat dalam menyikapi persoalan-persoalan publik (Kotschy, 2006). Secara sederhana Kotschy kemudian menjelaskan tentang potensi *e-democracy* yang memudahkan upaya pendekatan terhadap warga, memudahkan cara berkomunikasi, mengaktifkan komunikasi dan mengupayakan perubahan perilaku dari kelompok *silent majority* ke perilaku yang lebih menunjukkan kapasitas demokrasi mereka.

*E-democracy* sendiri harus dipahami sebagai salah satu bagian dari upaya membentuk tata pemerintahan yang transparan dan berakuntabilitas. Dalam laporan lintas negara terintegrasi yang disampaikan Zimmermann dan Erbe (2002: 56-64) kepada Europob, mereka menempatkan *e-democracy* paralel dengan kebutuhan akan adanya *e-government* dan *online administration*, *e-safety* dan *regulation*,

serta dengan *e-voting*. Secara keseluruhan hal ini dipandang bermanfaat untuk melakukan transformasi dalam komunikasi politik dan mobilisasi politik. Dalam laporan ini juga dinyatakan bahwa sejumlah kebijakan dari negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa ternyata sudah diorientasikan pada masyarakat informasi.

Kekuatan dari *new media* dalam mengisi celah alam demokrasi di antaranya terletak pada *weblogs* atau *blogosphere* atau *blogs* yang dipandang sebagai *websites* pendapat atau *websites* berita. Terlepas dari disparitas tentang keberadaannya -ada yang memandang berguna, tidak berguna, merugikan atau akan mati sendiri- *weblogs* tertentu dalam kenyataannya mampu "memaksa" orang untuk memerhatikan posisi dan pesan-pesannya. *Weblogs* sendiri jarang sekali tampil atau dipandang tampil dengan efek kekuatan yang besar. Sebagian peneliti bahkan lebih sering menempatkannya sebagai *intervening variable* daripada *independent* atau *causal variable*, lebih karena *weblogs* hanyalah bagian teramat kecil dari arus *web* yang terjadi, tidak ada organisasi sentral *blogs* dan tidak ada konsensus ideologi di antara *bloggers* (Reynolds, 2002).

Namun demikian, *weblogs* kemudian mampu menjelma menjadi sesuatu yang penting dan diperhatikan karena beberapa alasan berikut (Drezner dan Farreil, 2004: 3-4). Pertama, jurnalis dan pemuka pendapat adalah pembaca *blogs*. Hal ini memungkinkan *issue* di dalam *blogs* menjadi dipertajam dan ditonjolkan. Atau dengan kata lain, *blogs* bisa membuat dan memformat *frame* secara khusus *issue-issue* yang diumumkankannya. Kedua, *blogs* memiliki keunggulan kompetitif dalam hal kecepatan persebaran. Patut dicatat, keunggulan kompetitif ini tetap bersifat informal dan bukan dalam arti perbandingan kecepatan formal dengan media-media konvensional. Hanya saja dua alasan ini pun harus lebih dicermati untuk melihat aplikatif atau tidaknya di Indonesia karena kondisi penggunaan *blogs*, karakter dan tujuan pemanfaatan *blogs* serta daya dukung persebaran muatan isi dalam *blogs* amatlah berbeda dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Hal yang mirip dapat ditemukan di China yang pemerintahnya mulai melakukan pembatasan dengan mengharuskan penggunaan nama asli untuk para *bloggers*-nya.

Pemosisian *new media* dalam kampanye politik kerap digambarkan dalam kontribusinya untuk pendidikan politik, sebagai komplemen

untuk media konvensional, mendukung aktivitas *fundraising*, mengidentifikasi dan memotivasi warganegara aktif serta untuk komunikasi politik internal.<sup>8</sup> Pada dasarnya posisi seperti ini tak ubahnya dengan kontribusi media yang lain dalam suatu kehidupan politik. Perbedaan daya jangkau pun tak jauh berbeda dengan perbedaan daya jangkau antaragam media konvensional sendiri. Jika menilik dari hal ini, maka kekhasan dan kekhususan *new media* dalam kehidupan politik pada dasarnya hanya terletak pada penggunaan teknologi komunikasi yang memberi peluang akses lebih besar secara personal, meskipun cara memandang *new media* bisa pula dari keunggulan *connectivity*, *computability* dan *interactivity*-nya.

Persoalan yang kemudian muncul dari hal itu terletak pada munculnya pemisah antara mereka yang ramah teknologi dan mereka yang tertatih-tatih dalam memanfaatkan teknologi. Selain itu persoalan juga bisa bersumber dari besaran ketersediaan sarana untuk penyelenggaraan *new media* ini. Pada tataran ini *digital inequality* dan *digital divide* muncul sebagai persoalan yang layak diperhatikan. Konsekuensinya, pilihan pengembangan teknologi dan penyediaan sarana secara horizontal atau vertikal menuntut kesesuaian kondisi dan kebutuhan yang akan berbeda antarnegara dan bahkan antarwilayah.<sup>9</sup>

Memang tidak mudah menyelesaikan persoalan *digital inequality* dan *digital divide* ini. Kemauan politis untuk meniadakan kerap terhadap oleh kepentingan politik yang lain, benturan kepentingan ekonomi, resistensi budaya serta disharmoni sosial. Pada sisi ini *new media* lebih sering diposisikan sebagai suatu ancaman yang harus selalu dicurigai. Alih-alih membuat hilang atau kian berkurang, hal seperti ini justru akan menaikkan ketidaksamaan dan selisih kemampuan dalam ber-*new media*.

Meskipun keunggulan konektivitas, komputabilitas serta interaktivitas terdapat pada *new media*, persoalan justru bisa muncul dari karakter-karakter itu. Ketergantungan pada suatu jaringan yang melayani pengoperasian *new media* ini, sebagai contoh, bukan tak mungkin akan mengulang keluhan tahun-tahun 1970 dan 1980an saat ketidakseimbangan informasi dipermasalahkan. Menanggapi persoalan terganggunya jaringan kabel berkecepatan tinggi di dasar laut Samudera Pasifik akibat gempa Taiwan di akhir Desember 2006, Ross Veitch yang membangun jaringan Yahoo Asia Tenggara menyebutkan, persoalan ini terjadi karena tingginya ketergantungan Asia pada Amerika Serikat walaupun jaringan dengan Amerika Serikat sudah terlalu padat (*Kompas*, 29 Desember 2006: 9). Dengan kata lain, ketergantungan selalu akan menimbulkan masalah, termasuk ketergantungan dalam jaringan *new media*.

### Ber-*new media* Secara Jernih

Menempatkan *new media* secara benar, baik dari sisi struktur maupun fungsi, akan lebih memberi kelapangan dada untuk memilah keuntungan dan kerugiannya. Beberapa penelitian menunjukkan adanya korelasi antara dinamika *new media* dan demokratisasi serta kebebasan politik (Norris, 2001: dan Kedzie, 1997: 209-232). Hasil penelitian yang lain mengoreksi temuan-temuan seperti itu dan menyebut negara Kuba dan China sukses dalam "membatasi" internet lewat strategi reaktif dan proaktif mereka (Kalathil dan Boas, 2001; dan Agre dan Rotenberg, 1997). Penguatan terhadap lembaga politik dan warganegara, dan bukan tergantung pada teknologi, sebagai faktor yang berpengaruh terhadap demokratisasi merupakan hasil penelitian lainnya (Barber, 2001: 8). Inti dari hal-hal ini adalah adanya hambatan atau tantangan penggunaan *new media* dalam kehidupan sosial dan politik.

Antisipasi langkah yang harus dilakukan adalah dengan menempatkan *new media* secara benar, memandangnya secara jernih dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Seberapa pun kecilnya kontribusi, *new media* tentu memiliki pengaruh dalam proses demokratisasi dan kebebasan politik. Seberapa pun kecilnya juga, *new media* tentu mempunyai efek negatif. Namun mengulangi kesalahan yang sama dengan

<sup>8</sup> Presentasi tentang penggunaan internet dalam kampanye politik dapat dilihat di: [www.akamai.kolhoos.ee/tehnokratt/podcast/eHaaletus2006/12\\_ThadHall.ppt](http://www.akamai.kolhoos.ee/tehnokratt/podcast/eHaaletus2006/12_ThadHall.ppt)

<sup>9</sup> Lebih jauh tentang pilihan pengembangan horizontal dan vertikal ini dapat dilihat di "Aras dan Arus Kontribusi: Ekonomi Politik Industri Selular" yang terarsip di <http://yanpraz.multiply.com>.

membendung habis-habisan penggunaan *new media* tentu bukan suatu pilihan bijak. Teknologi yang tepat untuk demokrasi yang tepat tentu merupakan pilihan yang lebih tepat.

### Daftar Pustaka

- Abrash, Barbara. (2006). 'Digital Media and the Public Sphere.' Terarsip di: [www.centerforsocialmedia.org/future/docs/blogs\\_convening2.pdf](http://www.centerforsocialmedia.org/future/docs/blogs_convening2.pdf)
- Agre, P.E. dan M. Rotenberg (eds.). (1997). *Technology and Privacy: The New Landscape*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Barber, B.R. (2000/2001). 'Which Technology for Which Democracy? Which Democracy for Which Technology?' *International Journal of Communication Law and Policy*, No. 6. Winter.
- Dastidar, Surajit Ghosh. (2006). 'I-Flex: Developing a Product Strategy.' *The Management Case Study Journal*. Vol. 6. No. 1. 2006. hal. 68-84.
- Davey, Chris. (2005). 'CDMA 2000 1xEV-DO: Affordable Wireless High Speed Data Today'. CTIA. 24 Januari 2005.
- Drezner, Daniel W. dan Henry Farrell. (2004). 'The Power and Politics of Blog.' Terarsip di: [www.utsc.utoronto.ca/~farrell/blogpaperfinal.pdf](http://www.utsc.utoronto.ca/~farrell/blogpaperfinal.pdf)
- Entner, Roger dan David Lewin. (2005). 'The Impact of the US Wireless Telecom Industry on the US Economy'. CTIA. September 2005.
- Gallagher, Frank. (2005). 'Legg Masson Telecommunication.' CTIA. 24 Januari 2005.
- Kalathil, S. dan T. Boas. (2001). 'The Internet and State Control in Authoritarian Regimes: China, Cuba and Counterrevolution.' Kertas kerja pada Carnegie Endowment for International Peace. No. 21 July 2001.
- Kedzie, C. (1997). 'A Brave New World or a New World Order?' Dalam S. Keisler (ed.). *Culture of the Internet*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Hal. 209-232.

- Kotschy, Waltraut. (2006). 'E-Democracy: Strengthening the Participation of Citizens in Government.' Terarsip di: [26konferencja.giodo.gov.pl/data/resources/KotschyW\\_pres.pdf](http://26konferencja.giodo.gov.pl/data/resources/KotschyW_pres.pdf)
- McKee, Alan. (2005). *The Public Sphere: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Myers, Roc A. (2000). *Strategic Knowledgecraft: Operational Art for the Twenty-First Century*. Harvard: Center for Information Policy Research-Harvard University.
- Norris, P. (2001). *Digital Divide? Civic Engagement, Information Poverty and the Internet Worldwide*. New York: Cambridge University Press.
- Owens, Leslie D. dan Booz Allen Hamilton. (2002). 'Comparison of Cellular Industry ('92) to WIFI Industry ('02).' *CTIA Critical Issues Forum*. 15 November 2002.
- Prajarto, Nunung. (2006). 'Aras dan Arus Kontribusi: Ekonomi Politik Industri Selular.' Terarsip di <http://yanpraz.multiply.com>
- Reynolds, Glenn Harlan. (2002). 'Symbiotic Media.' *Tech Central Station*. 19 October 2002.
- Roche, Robert F. (2005). 'What's Up with Wireless?' *VP Research CTIA*. 11 Agustus 2005.
- Sassi, Sinikka. (2001). 'The Transformation of Public Sphere.' Dalam Barrie Axford dan Richard Huggins (eds.). *New Media and Politics*. London: Sage Publications. Hal. 89-108.
- Torach, Julius Peter dan Constantine Bitwayiki. (2006). 'Uganda Puts ICTs under One Political Leadership.' Presentation at GTEC/CePRC eGovernment Workshop. Ottawa. 24 Oktober 2006.
- Zimmermann, Ann dan Jessica Erbe. (2002). 'Internet-a New Potential for European Political Communication?' Terarsip di: [europub.wz-berlin.de/Data/Conference%20material/europub%20conference.pdf](http://europub.wz-berlin.de/Data/Conference%20material/europub%20conference.pdf)